BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut diambil dari semua pembahasan penelitian:

1. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Tealanaipura Kota Jambi di sebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, faktor ekonomi atau kondisi keuangan pelaku yang tindak memungkinkannya untuk membiayai berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua yaitu faktor pendidikan pelaku yang berimplikasi terhadap jenis dan level pekerjaan yang sekaligus berpengaruh terhadap jumlah penghasilan yang dapat diperolehnya. Ketiga, faktor kelalaian atau ketidakwaspadaan masyarakat atau korban terhadap hak milik mereka.

2. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana Curat di Wilayah Kota Jambi, maka pihak Polsek Telanaipura Kota Jambi menggelar sosialisasi hukum di sejumlah ruang publik kepada masyarakat sebagai bentuk upaya preemtif. Di samping itu, Pihak Polsek Telanaipura Kota Jambi juga mengadakan patroli pada waktu-waktu tertentu secara simultan ke sejumlah lokasi, seperti kelurahan Telanaipura, kelurahan IV Sipin, hingga kelurahan Penyengat Rendah untuk mengamati, mengawasi, mencermati dan melakukan penindakan sesuai dengan kondisi dan situasi di lokasi tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Kepolisian dan prosedur yang diatur dalam KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan temuan studi, saran berikut dapat dibuat:

1. Kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana curat di Tealanipura Kota Jambi, menunjukkan perlunya pembenahan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat di beberapa bidang, antara lain standar pendidikan, jumlah lapangan kerja yang tersedia, dan intensitas nilai-nilai moral atau kegiatan pendidikan di lingkungan sekitar, khususnya di kalangan generasi muda.
2. Pada hakekatnya masyarakat itu sendiri adalah pihak yang berusaha dilindungi oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan upaya pencegahan, diperlukan peran serta dan perhatian masyarakat selain peran aparat penegak hukum dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegiatan illegal.